

**RANCANGAN AKHIR RENJA
PERUBAHAN TAHUN 2025**

**DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TANAH LAUT**



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/ 824 -KUM/2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah selaras dengan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu penetapan Keputusan Bupati untuk menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2025 –

- 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 12);
22. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 39);
 23. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 34);
 24. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 69);
 25. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:
- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi renja sampai dengan triwulan I tahun berkenaan;
 - c. rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
 - d. penutup.
- KETIGA** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagai pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum

Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(Perubahan KUA dan PPAS) Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

DAFTAR ISI

	Hal	
Daftar Isi.....		i
BAB I PENDAHULUAN		1
A. Latar Belakang		1
B. Landasan Hukum		2
C. Maksud dan Tujuan		5
D. Sistematika Penulisan.....		5
BAB II EVALUASI HASIL Renja SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I.....		7
Evaluasi Hasil Renja SKPD DPUPRP Sampai Dengan Triwulan I		7
BAB III TUJUAN DAN SASARAN.....		26
A. Tujuan dsan Sasaran.....		26
BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD.....		37
A. Program dan Kegiatan.....		37
B. Rencana Program Kegiatan Pada Renja Perubahan Tahun 2025.....		45
BAB V PENUTUP		81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada Pasal 343 ayat (1) dijelaskan bahwa : Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Atas dasar Pasal 343 ayat (1) Permendagri No 86 Th 2017 tersebut tidak terkecuali Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut selaku SKPD untuk tahun anggaran 2025 harus menyusun Renja Perubahan SKPD.

Renja Perubahan SKPD disusun dengan mengacu pada RKPD Perubahan, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan. Program dan kegiatan Perubahan yang akan diusulkan tentunya harus selaras dengan RPJMD dan Renstra SKPD, agar tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai sesuai tahapan waktunya.

Penyelarasan ini penting karena berkaitan dengan kesinambungan suatu perencanaan yang telah ditetapkan, dimana Renja Perubahan SKPD adalah merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra SKPD dan RPJMD yang dilakukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan baik dalam Renstra SKPD maupun dalam RPJMD.

Penyusunan Renja SKPD tentunya nanti akan diteruskan dalam penyusunan RKPD Perubahan, yang selanjutnya akan dituangkan lagi ke dalam KUPA/PPAS Perubahan sebagai dasar nantinya penyusunan RKA Perubahan SKPD. Selanjutnya setelah RKA Perubahan SKPD dibahas dan dihimpun menjadi dokumen APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, hasil akhir dokumen perencanaan tahunan adalah ditetapkan DPA Perubahan SKPD TA 2025 sebagai dasar pelaksanaan anggaran dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 dilandasi oleh :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) ;
2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 ;

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47) ;
4. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
6. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 11 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
18. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Renja Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah yang jelas berupa Program dan Kegiatan dengan target kinerjanya yang akan dilaksanakan dalam satu Tahun Anggaran, yaitu tahun anggaran 2025. Renja perubahan ini juga sebagai penyelarasan anggaran dan target kinerja sebagai berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

1. Pergeseran dan Penambahan anggaran karena anggaran yang tersedia tidak mencukupi dalam pencapaian target capaian kinerja ;
2. Mendukung Asta Cita Program Pembangunan Nasional ;
3. Pengurangan anggaran dalam rangka penyehatan struktur APBD.

Berdasarkan Renja Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan inilah maka nantinya akan diformulasikan dalam APBD Perubahan Kabupaten Tanah Laut melalui mekanisme yang berlaku.

D. Sistematika Penulisan

Renja Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 disajikan dalam bentuk sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari uraian tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

BAB II EVALUASI HASIL RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Berisi tentang Kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi Uraian Tujuan Sasaran Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD

Berisi uraian tentang Kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan .

BAB II

EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Evaluasi Hasil RENJA SKPD DPUPRP TA 2025 Sampai Dengan Triwulan I

Evaluasi atas pelaksanaan RENJA SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 yang telah menjadi Belanja dalam APBD TA 2025 yang terdiri dari 12 Program, 23 Kegiatan dan 86 Sub Kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

EVALUASI HASIL RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Target s.d Tw I		Realisasi s.d Tw I			
			Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan	
			(%)	(Rp)			Rp	%
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14,163,221,159.00	23.83%	3,375,600,040.00	21.88%		3,165,110,514.00	22.35%
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99,810,815.00	0.00%	0.00	0.00%		65,711,389.00	65.84%
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	35,561,645.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	20,073,599.00	56.45%

1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	64,249,170.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	45,637,790.00	71.03%
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9,868,357,810.00	24.85%	2,452,714,623.00	23.18%		2,287,768,493.00	23.18%
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	9,810,858,486.00	25.00%	2,452,714,623.00	23.32%	0.55%	2,287,768,493.00	23.32%
1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	57,499,324.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	141,561,298.00	25.00%	35,390,326.00	0.00%		0.00	0.00%
1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	29,561,298.00	25.00%	7,390,326.00		0.00%	0.00	0.00%

1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	112,000,000.00	25.00%	28,000,000.00		0.00%	0.00	0.00%
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	404,325,236.00	3.62%	14,656,591.00	17.48%		70,652,409.00	17.47%
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	19,987,536.00	25.00%	4,996,884.00		0.00%	0.00	0.00%
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	113,336,957.00	0.00%	0.00		0.00%	0.00	0.00%
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	16,999,113.00	25.00%	4,249,779.00		0.00%	0.00	0.00%

1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	33,833,927.00	0.00%	0.00		0.00%	0.00	0.00%
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	3,000,000.00	25.00%	750,000.00		0.00%	0.00	0.00%
1.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	16,650,000.00	25.00%	4,162,500.00		0.00%	0.00	0.00%
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	198,528,000.00	0.00%	0.00	35.59%	0.02%	70,652,409.00	35.59%
1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	1,989,703.00	25.00%	497,428.00		0.00%	0.00	0.00%

1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24,309,000.00	25.00%	6,077,250.00	0.00%		0.00	0.00%
1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	24,309,000.00	25.00%	6,077,250.00		0.00%	0.00	0.00%
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,432,807,500.00	25.00%	858,201,875.00	20.52%		704,282,223.00	20.52%
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	410,000,000.00	25.00%	102,500,000.00	19.25%	0.02%	78,945,099.00	19.25%
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	3,022,807,500.00	25.00%	755,701,875.00	20.69%	0.15%	625,337,124.00	20.69%
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	192,049,500.00	4.46%	8,559,375.00	19.11%		36,696,000.00	19.11%

1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	16,200,000.00	25.00%	4,050,000.00	25.00%	0.00%	4,050,000.00	25.00%
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	157,812,000.00	0.00%	0.00	20.69%	0.01%	32,646,000.00	20.69%
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	18,037,500.00	25.00%	4,509,375.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	78,438,482,593.00	14.45%	11,332,495,647.00	3.21%		4,333,487,144.00	5.52%
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	53,270,764,458.00	13.10%	6,980,837,876.00	1.62%		3,414,267,400.00	6.41%
1.03.02.2.01.0072	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Pekerjaan Umum,	99,999,900.00	25.00%	24,999,975.00	15.00%	0.00%	26,769,600.00	26.77%

	Penataan Ruang dan Pertanahan)							
1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	499,996,163.00	25.00%	124,999,043.00	30.00%	0.04%	53,445,900.00	10.69%
1.03.02.2.01.0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	3,699,998,725.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	2,255,337,500.00	60.96%
1.03.02.2.01.0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	999,998,327.00	25.00%	249,999,584.00		0.00%	0.00	0.00%
1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	7,947,424,856.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	930,119,000.00	11.70%
1.03.02.2.01.0102	Pembangunan Breakwater (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	5,099,382,471.00	25.00%	1,274,845,620.00		0.00%	0.00	0.00%
1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	11,799,661,793.00	25.00%	2,949,915,449.00		0.00%	0.00	0.00%

1.03.02.2.01.0110	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	499,989,568.00	25.00%	124,997,392.00		0.00%	0.00	0.00%
1.03.02.2.01.0114	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	944,963,721.00	25.00%	236,240,931.00		0.00%	0.00	0.00%
1.03.02.2.01.0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	5,099,382,471.00	25.00%	1,274,845,620.00		0.00%	0.00	0.00%
1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	3,099,998,399.00	0.00%	0.00	22.50%	0.17%	148,595,400.00	4.79%
1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	10,599,991,016.00	0.00%	0.00		0.00%	0.00	0.00%
1.03.02.2.01.0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	1,879,977,048.00	25.00%	469,994,262.00		0.00%	0.00	0.00%

1.03.02.2.01.0127	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	500,000,000.00	25.00%	125,000,000.00		0.00%	0.00	0.00%
1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	500,000,000.00	25.00%	125,000,000.00		0.00%	0.00	0.00%
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	25,167,718,135.00	17.29%	4,351,657,771.00	6.59%		919,219,744.00	3.65%
1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	1,199,738,129.00	25.00%	299,934,533.00		0.00%	0.00	0.00%
1.03.02.2.02.0004	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	2,599,984,902.00	25.00%	649,996,227.00		0.00%	0.00	0.00%

1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	1,344,953,924.00	25.00%	336,238,481.00		0.00%	0.00	0.00%
1.03.02.2.02.0010	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	5,997,038,117.00	25.00%	1,499,259,530.00		0.00%	0.00	0.00%
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	1,864,992,650.00	25.00%	466,248,164.00		0.00%	0.00	0.00%
1.03.02.2.02.0016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	6,049,867,575.00	0.00%	0.00		0.00%	0.00	0.00%
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	1,399,959,511.00	25.00%	349,989,880.00		0.00%	0.00	0.00%
1.03.02.2.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	299,969,142.00	25.00%	74,992,287.00	0.00%	0.00%	204,670,000.00	68.23%
1.03.02.2.02.0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	2,699,994,676.00	25.00%	674,998,669.00	47.56%	0.31%	625,348,644.00	23.16%

1.03.02.2.02.0034	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	211,220,509.00	0.00%	0.00		0.00%	0.00	0.00%
1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	1,499,999,000.00	0.00%	0.00	25.00%	0.09%	89,201,100.00	5.95%
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	27,828,941,174.00	13.48%	3,752,449,433.00	1.64%		371,250,000.00	1.33%
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	27,828,941,174.00	13.48%	3,752,449,433.00	1.64%		371,250,000.00	1.33%
1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	12,209,989,995.00	0.00%	0.00		0.00%	0.00	0.00%
1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	609,153,453.00	0.00%	0.00	75.00%	0.11%	371,250,000.00	60.95%

1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	10,000,000,000.00	25.00%	2,500,000,000.00		0.00%	0.00	0.00%
1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	4,509,797,726.00	25.00%	1,127,449,433.00		0.00%	0.00	0.00%
1.03.03.2.01.0033	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	500,000,000.00	25.00%	125,000,000.00		0.00%	0.00	0.00%
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	6,041,000,000.00	0.00%	0.00	5.00%		0.00	0.00%
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	6,041,000,000.00	0.00%	0.00	5.00%		0.00	0.00%
1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	6,041,000,000.00	0.00%	0.00	5.00%	0.07%	0.00	0.00%

1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	21,624,258,666.00	24.74%	5,349,999,987.00	2.91%		216,150,000.00	1.00%
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	21,624,258,666.00	24.74%	5,349,999,987.00	2.91%		216,150,000.00	1.00%
1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	21,399,999,939.00	25.00%	5,349,999,987.00	1.89%	0.10%	0.00	0.00%
1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	224,258,727.00	0.00%	0.00	100.00%	0.05%	216,150,000.00	96.38%
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	72,748,795,674.00	0.00%	0.00	12.14%		6,834,179,100.00	9.39%
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	72,748,795,674.00	0.00%	0.00	12.14%		6,834,179,100.00	9.39%

1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	72,748,795,674.00	0.00%	0.00	12.14%	2.11%	6,834,179,100.00	9.39%
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	193,258,277,988.00	0.28%	550,000,002.00	0.00%		40,248,212.00	0.02%
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	193,258,277,988.00	0.28%	550,000,002.00	0.00%		40,248,212.00	0.02%
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	2,199,999,999.00	25.00%	550,000,002.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	6,020,701,516.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%

1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	43,129,220,454.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	77,755,954,545.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
1.03.10.2.01.0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	3,686,482,630.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	4,799,173,974.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	20,334,634,937.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	13,036,058,822.00	0.00%	0.00	0.01%	0.00%	40,248,212.00	0.31%
1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	18,496,057,470.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%

1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	3,799,993,641.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	118,000,000.00	0.00%	0.00	0.00%		0.00	0.00%
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	118,000,000.00	0.00%	0.00	0.00%		0.00	0.00%
1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	118,000,000.00	0.00%	0.00		0.00%	0.00	0.00%
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2,993,458,578.00	0.76%	22,617,142.00	2.16%		64,794,647.00	2.16%
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	2,410,704,752.00	0.94%	22,617,142.00	1.90%		45,915,195.00	1.90%
1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	221,301,560.00	0.00%	0.00	20.75%	0.01%	45,915,195.00	20.75%

1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	1,779,157,279.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
1.03.12.2.01.0007	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	90,468,565.00	25.00%	22,617,142.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	185,911,629.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	133,865,719.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	479,113,826.00	0.00%	0.00	0.00%		0.00	0.00%
1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	479,113,826.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	103,640,000.00	0.00%	0.00	18.22%		18,879,452.00	18.22%

1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	103,640,000.00	0.00%	0.00	18.22%	0.00%	18,879,452.00	18.22%
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	1,034,090,419.00	0.00%	0.00	0.00%		0.00	0.00%
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,034,090,419.00	0.00%	0.00	0.00%		0.00	0.00%
2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	474,030,805.00	0.00%	0.00		0.00%	0.00	0.00%
2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	560,059,614.00	0.00%	0.00		0.00%	0.00	0.00%
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	53,235,423.00	0.00%	0.00	0.00%		0.00	0.00%

2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	53,235,423.00	0.00%	0.00	0.00%		0.00	0.00%
2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan)	53,235,423.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
		418,301,761,674	5.83%	24,383,162,251		3.80%	15,025,219,617	3.59%

Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Renja 2025 Dinas PUPRP

Rata-rata realisasi capaian kinerja atas pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar 3,8 % dan realisasi keuangan rata-rata 3,59 % . Sasaran yang ditetapkan dapat terlaksana dengan baik dan sedang dalam proses pelaksanaan pada tahun anggaran berjalan, sehingga dengan adanya Renja Perubahan SKPD Tahun 2025 nantinya pada akhir tahun anggaran realisasi diperkirakan akan mencapai di atas 90%.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah pernyataan hasil yang diharapkan dapat dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Petanahan Kabupaten Tanah Laut dalam kurun waktu tiga tahun mendatang. Dapat dikatakan bahwa tujuan merupakan capaian kinerja dalam kurun waktu tiga tahun (jangka menengah), sedangkan sasaran merupakan capaian kinerja dalam kurun waktu satu tahun (jangka pendek). Penetapan tujuan dan sasaran berfungsi sebagai arah dari kebijakan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dalam melaksanakan fungsi, alokasi, distribusi dan regulasi sumberdaya yang dimiliki untuk diimplementasikan dalam penetapan strategi berupa program dan kegiatan dalam 3 (tiga) tahun mendatang.

. Perumusan tujuan dan sasaran beserta indikatornya adalah tahapan strategis yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, perumusan tujuan dan sasaran mengacu langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih, namun pada periode ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru menggunakan pendekatan yang berbeda karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merumuskan sebuah konsep Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026
3. Misi RPJPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025
4. Isu-isu strategis Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.

Dari hasil penyandingan muatan konsideran tersebut, teridentifikasi tiga aspek yang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan fokus dari perencanaan periode selanjutnya. Ketiga aspek tersebut yaitu: Pembangunan manusia, pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan pembangunan Tata Kelola Pemerintahan.

Aspek Pembangunan Manusia adalah dimensi perencanaan yang berkaitan dengan meningkatkan kualitas hidup manusia Kabupaten Tanah Laut. Aspek pembangunan Ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan merupakan aspek dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan kegiatan yang bernilai ekonomi serta memberikan layanan-layanan pemenuhan infrastuktur yang berwawasan lingkungan. Sedangkan aspek pembangunan Tata Kelola Pemerintahan adalah aspek yang fokus kepada kualitas tata kelola pemerintah sebagai pihak yang memfasilitasi hak-hak masyarakat dan menjamin akses serta kolaborasi pembangunan yang inklusif. Ketiga aspek ini selanjutnya menjadi dasar perumusan konsep Rencana Pembangunan Daerah yang kemudian diturunkan menjadi rangkaian rumusan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026. Selengkapnya proses perumusan konsep RPD dapat dilihat pada gambar berikut.

Tabel 3.1 Sandingan Dokumen Konsideran dan Isu Strategis dalam Perumusan Konsep Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026

AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN TAHUN 2020 - 2024	MISI RPJMD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021-2026	MISI RPJPD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2005-2025	ISU STRATEGIS KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024-2026	RPD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024-2026
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing • Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berbudi pekerti luhur 	<ul style="list-style-type: none"> • Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 	<ul style="list-style-type: none"> • Aksebilitas Pendidikan dan Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan • Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan • Memperkuat infrastruktur dan mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar • Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata • memperkuat sarana prasarana dasar dan perekonomian • meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bertumpu pada pengembangan industri berbasis pertanian, kelautan, pertambangan, dan pariwisata • Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang Berwawasan lingkungan dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan investasi • infrastruktur Dasar dan Lingkungan Hidup yang berkualitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Ekonomi Masyarakat Secara merata dengan pembangunan Infrasturktur yang berwawasan lingkungan

bencana, dan perubahan iklim		Berkelanjutan		
<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Mewujudkan penegakan supremasi hukum dan ketertiban serta penerapan sistem otonomi daerah dengan tata kelola pemerintahan yang baik 	<ul style="list-style-type: none"> • Reformasi Birokrasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Sumber: RPJMN 2020-2024, RPJMD Prov. Kalimantan Selatan 2021-2026, RPJPD Kabupaten Tanah Laut 2005-2025, Diolah 2023

Adapun Konsep RPD Tahun 2024-2026 adalah “Tanah Laut Berdaya Saing”. Makna dari “Berdaya saing” mengandung arti suatu kemampuan dan kemapanan terhadap tatanan dasar masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang memiliki keunggulan kompetitif untuk menghadapi persaingan global dimasa yang akan datang. Tatanan dasar tersebut mencakup sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur yang berkualitas, perekonomian yang inklusif (merata) dan iklim usaha (investasi) yang kondusif, dan pemerintahan daerah yang profesional dan bersih.

Berdasarkan konsep RPD tersebut masing-masing aspek kemudian dielaborasikan menjadi 3 tujuan dengan 20 sasaran turunannya. Adapun masing-masing sasaran diformulasikan dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang memiliki keterkaitan antar bidang urusan (cross cutting issue). Penjabaran tujuan dan sasaran tersebut selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	DATA AWAL		TARGET			KONDISI AKHIR
				2022 (REALISASI)	2023 (PROYEKSI)	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas		IPM	70,35	70,4 - 70,72	70,80	71	71,30	71,30
	1.1	Meningkatnya layanan dan aksesibilitas Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	12,32	12,35	12,37	12,39	12,4	12,4
			Angka Rata-Rata Lama Sekolah	7,90	7,95	8,05	8,15	8,25	8,25
	1.2	Meningkatnya layanan dan aksesibilitas Kesehatan	Angka Harapan Hidup	69,86	69,94	69,96	69,98	70,00	70,00
	1.3	Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga	Persentase pemuda berprestasi	22,22	30	40	45	50	50
			Persentase atlet berprestasi	86,97	85	85	90	95	95
	1.4	Meningkatnya peran perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	72,86 (2021)	73,00	73,05	73,10	73,15	73,15
2	Peningkatan Ekonomi Masyarakat Secara merata dengan pembangunan Infrastruktur yang berwawasan lingkungan		Pertumbuhan Ekonomi	5,12	4,5 - 5,0	4,6 - 5,0	4,7 - 5,0	4,8 - 5,0	4,8 - 5,0
			Gini Ratio	0,263	0,230	0,229	0,228	0,227	0,227
			Angka Kemiskinan	3,86	3,55	3,45	3,35	3,30	3,30
	2.1	Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan	2,70	3,80	2,85	2,9	2,95	2,95

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	DATA AWAL		TARGET			KONDISI AKHIR	
			2022 (REALISASI)	2023 (PROYEKSI)	2024	2025	2026		
	2.2	Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan	3,86	3,48	3,52	3.55	3.58	3.58
	2.3	Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	7,10	4,81	4,9	4.95	5,0	5,0
	2.4	Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Pariwisata	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata (akomodasi dan Makan Minum)	6,54	12,10	11,75	11,70	11,70	11,70
	2.5	Meningkatnya investasi daerah	Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah	105	5	5	5	5	5
	2.6	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas	Indeks Infrastruktur	43.64	47.11	47.91	54.21	60.49	60.49
	2.7	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	IKLH	67,78	68,47	68,57	68,67	68,77	68,77
			Indeks Resiko Bencana	156.78	156.7	156.5	156.25	156	156
	2.8	Meningkatnya kemandirian PPKS	Persentase PPKS yang Mandiri	13.32	15	17.5	20	22.5	22.5
	2.9	Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan	82.06	82.3	82.6	82.8	83	83

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	DATA AWAL		TARGET			KONDISI AKHIR	
			2022 (REALISASI)	2023 (PROYEKSI)	2024	2025	2026		
		Pangan							
	2.10	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,17	3,55	3,45	3,35	3,30	3,30
	2.11	Meningkatnya status kemajuan dan kemandirian desa	Nilai Rata-rata Indeks Desa Membangun	0.707 (2021)	0.73	0.74	0.75	0.76	0.76
3	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)		Indeks Reformasi Birokrasi	60.19 (Baik)	61	62	63	65	65
	3.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	67.28 (B)	69.00 (B)	70.01 (BB)	75.00 (B)	80.01 (A)	80.01 (A)
	3.2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	49,38 (SPP) (2021)	61 (PB)	66 (PB)	71 (PB)	76 (Baik)	76 (Baik)
	3.3	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari Pemerintah	Indeks Pelayanan Publik	4,53 / A	4,53 / A	4,54 / A	4,55 / A	4,57 / A	4,57 / A
	3.4	Meningkatnya Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	3.11	3.15	3.2	3.4	3.6	3.6

Berdasarkan tabel Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 di atas, Dinas PUPRP melaksanakan turunan dari Tujuan dan Sasaran Daerah yaitu :

1. Peningkatan Ekonomi Masyarakat Secara merata dengan pembangunan Infrastruktur yang berwawasan lingkungan dengan Sasaran Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas.
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dengan Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sasaran Pembangunan yang dilakukan oleh Dinas PUPRP khususnya dibidang infrastruktur dengan tujuan ***Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas dan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*** setiap tahun secara berkelanjutan dengan sasaran :

- Meningkatnya infrastruktur ke PU an yang berkualitas.
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPUPRP

Penjabaran tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran Dinas PUPRP dalam tiga (tiga) tahun mendatang sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 3.3 (T-C.25).
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Baseline Kinerja Tujuan/Sasaran PD		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
				Realisasi	Proyeksi	2024	2025	2026
				2022	2023			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026								
1	Peningkatan Ekonomi Masyarakat Secara merata dengan pembangunan Infrastruktur yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya pembangunan infrastuktur yang berkualitas	Indeks Infrastruktur	43,64 %	47,11 %	47,9 1%	54,2 1%	60,4 9%
Tujuan dan Sasaran Renstra DPUPRP Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026								
1	Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya infrastruktur ke PU an yang berkualitas	Indeks Infrastruktur PU	73.48 %	85%	73,6 5%	74,7 7%	75,6 9%
Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026								

2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip Kabupaten	67,28 (B)	69.00 (B)	70.01 (BB)	75 (BB)	80.01 (A)
Tujuan dan Sasaran Renstra DPUPRP Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026								
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPUPRP	Nilai Sakip DPUPRP	72,60 (BB)	80.05 (A)	80.06 (A)	80.07 (A)	81 (A)

BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD

A. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan.

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 adalah :

-DINAS

-DINAS

1) PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH

1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- 1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

5) Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 2) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 3) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 4) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 6) Penyediaan Bahan/Material
- 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2) Pengadaan Mebel

7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 3) Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya

2) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

1) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
- 2) Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku
- 3) Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai
- 4) Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota
- 5) Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya
- 6) Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
- 7) Pembangunan Breakwater
- 8) Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
- 9) Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya

- 10) Rehabilitasi Tanggul Sungai
- 11) Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing
- 12) Normalisasi/Restorasi Sungai
- 13) Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
- 14) Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampungan Air Lainnya
- 15) Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
- 16) Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota

2) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
- 2) Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
- 3) Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa
- 4) Peningkatan Irigasi Permukaan
- 5) Peningkatan Irigasi Rawa
- 6) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
- 7) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
- 8) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
- 9) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa
- 10) Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi
- 11) Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi

c) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- 2) Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan
- 3) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
- 4) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan
- 5) Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

d) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat

e) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
- 2) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan

f) PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

- 1) Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

g) PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

1. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

- 1) Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
- 2) Pembangunan Jalan
- 3) Pelebaran Jalan Menuju Standar
- 4) Rekonstruksi Jalan
- 5) Rehabilitasi Jalan
- 6) Pemeliharaan Rutin Jalan
- 7) Pembangunan Jembatan
- 8) Penggantian Jembatan
- 9) Rehabilitasi Jembatan
- 10) Pemeliharaan Rutin Jembatan

h) PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

1. Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan Jalan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

- 1) Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota

I) PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

- 1) Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
- 2) Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota
- 3) Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang
- 4) Penetapan RDTR Kabupaten/Kota
- 5) Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang

2) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota

3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

J) PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**1. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

K) PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**1. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota

- UPT. PPMK

a) PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH**1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 2) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 3) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 4) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
- 3) Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya

B. Rencana Program Kegiatan Pada Renja Perubahan Tahun 2025.

Adapun Kegiatan yang diusulkan dalam Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut dengan kinerja yang akan dicapai adalah sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.1 Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja SKPD Tahun 2025 DPUPRP

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2	3	4	5	6	7	
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan					298.972.761.213,00	420.505.431.108,38	481.841.423.202,98
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					297.900.151.590,00	419.023.554.304,56	480.754.097.360,89
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					297.900.151.590,00	419.023.554.304,56	480.754.097.360,89
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Sekretariat Dinas PUPRP	81 Nilai	81 Nilai	14.727.197.114,00	15.243.214.855,88	15.392.424.091,55	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	100 persen	16.999.487,00	124.777.746,40	124.777.746,40	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	9.999.712,00	52.277.538,44	35.561.645,25	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							

	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	6.999.775,00	72.500.207,96	64.249.170,10
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	9.824.858.176,00	9.910.768.043,40	9.910.768.043,40
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	71 Orang/bulan	9.810.858.486,00	9.810.858.486,00	10.256.548.388,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	13.999.690,00	99.909.557,40	57.499.324,49
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	155.561.298,00	155.561.298,00	155.561.298,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	29.561.298,00	29.561.298,00	0,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						

	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 Orang	16 Orang	112.000.000,00	112.000.000,00	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	840.211.018,00	765.835.633,08	765.835.633,08
Penyediaan Komponen Instalasi						
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	19.987.536,00	19.987.536,00	22.545.719,70
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	152.070.643,00	137.289.994,00	113.336.957,48
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	16.999.113,00	16.999.113,00	16.999.113,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	34.914.051,00	34.914.051,00	33.833.926,65
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Penyediaan Bahan/Material						
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	14.510.914,00	16.650.000,00	19.619.569,68
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	508.750.000,00	366.250.000,00	353.528.000,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.989.703,00	1.989.703,00	1.989.703,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	24.309.000,00	24.309.000,00	24.309.000,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00
Pengadaan Mebel						
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	24.309.000,00	24.309.000,00	24.309.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	3.432.807.500,00	3.432.807.500,00	3.432.807.500,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	410.000.000,00	410.000.000,00	410.000.000,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						

	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	3.022.807.500,00	3.022.807.500,00	3.066.007.500,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	432.450.635,00	829.155.635,00	829.155.635,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	16.200.000,00	16.200.000,00	23.490.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit	43 Unit	184.098.000,00	178.902.000,00	157.812.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	16 Unit	18.037.500,00	18.037.500,00	18.037.500,00

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Kawasan Daerah Aliran Sungai yang Terlindungan Daya Rusak Air Persentase Kawasan Pesisir yang Terlindungi Daya Rusak Air Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik Persentase Area yang Dilayani Irigasi	17,80 53,72 73,11 87,09 Persen Persen Persen Persen	17,80 53,72 73,11 87,09 Persen Persen Persen Persen	57.832.178.051,00	81.605.144.816,98	86.273.377.237,80
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luasan Kawasan Daerah Aliran sungai yang terlindungi daya rusak air	397.28 hektar	397.28 hektar	40.972.742.271,00	54.972.721.769,56	54.972.721.769,56
Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota						
	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	99.999.900,00	99.999.900,00	99.999.900,00
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota						
	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	28 Lembaga	28 Lembaga	499.996.163,00	499.996.163,00	499.996.163,00
Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai						
	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	4 KM	11 KM	1.199.963.528,00	3.899.959.465,89	4.099.998.079,14
Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya						

	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	3 Unit	5 Unit	499.998.739,00	999.998.327,27	999.998.327,27
Normalisasi/Restorasi Sungai						
	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	29500 KM	32.5 KM	7.299.428.027,00	7.499.422.625,54	8.147.419.454,87
Pembangunan Breakwater						
	Panjang Breakwater yang Dibangun	0,26 KM	0,15 KM	5.099.382.471,00	5.099.382.471,00	5.099.382.471,00
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing						
	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0,5 KM	0,37 KM	1.699.671.920,00	11.799.661.793,46	11.799.661.793,46
Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing						
	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	0,15 KM	0,15 KM	499.989.568,00	499.989.568,00	499.989.568,00
Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya						
	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	944.963.721,00	944.963.721,00	944.963.721,00
Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya						
	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	0,2 KM	0,4 KM	5.099.382.471,00	5.099.382.471,00	9.699.380.259,32
Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota						
	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai						

	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	9 Dokumen	10 Dokumen	4.549.997.698,00	5.049.997.198,00	3.099.998.398,50
Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya						
	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	4 Unit	4 Unit	10.599.991.017,00	10.599.991.017,00	10.599.991.016,24
Rehabilitasi Tanggul Sungai						
	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	8 KM	8 KM	1.879.977.048,00	1.879.977.048,40	1.879.977.048,40
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku						
	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya						
	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1 Dokumen	3 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	699.999.999,80

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah irigasi kabupaten dalam kondisi baik	88 DI/DIR	88 DI/DIR	16.859.435.780,00	26.632.423.047,42	26.632.423.047,42
Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan						
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0,08 KM	0,07 KM	1.199.738.129,00	1.199.738.129,00	1.199.738.129,00
Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa						
	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun	0,038 KM	0,049 KM	1.799.995.246,00	2.599.984.901,65	4.134.894.473,32
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan						
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0,2 KM	0,2 KM	1.344.953.924,00	1.344.953.924,00	1.344.953.924,00
Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa						
	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan	0,5 KM	5,350 KM	1.799.950.117,00	5.997.038.116,74	5.997.038.116,74
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan						
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0,4 KM	0,6 KM	1.664.993.638,00	1.864.992.649,91	2.064.991.661,82
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa						
	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	0,3 KM	10 KM	5.649.863.824,00	6.849.859.238,69	6.049.867.574,69
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan						
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,25 KM	0,5 KM	499.976.547,00	1.399.959.510,97	1.399.959.510,97
Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi						

	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Bendung	2 Bendung	299.969.142,00	299.969.142,00	599.963.463,34
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa						
	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	3 KM	6 KM	499.996.654,00	2.699.994.675,52	2.699.994.675,52
Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi						
	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	4 Lembaga	4 Lembaga	399.999.559,00	375.933.759,24	311.220.509,00
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa						
	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	4 Dokumen	9 Dokumen	1.699.999.000,00	1.999.998.999,70	1.799.998.999,40
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang terlayani Air Minum Layak	82 persen	82 persen	19.410.000.000,00	28.229.787.720,66	29.319.031.261,96
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	82 persen	82 persen	19.410.000.000,00	28.229.787.720,66	28.229.787.720,66
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan						
	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	83 Unit	136 Unit	8.300.000.000,00	12.609.989.995,00	13.700.080.083,10
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)						

	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	8 Dokumen	8 Dokumen	610.000.000,00	609.999.999,80	609.153.453,00
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan						
	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	2.5 Liter/Detik	1 Liter/Detik	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan						
	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	0 SR	200 SR	0,00	4.509.797.725,86	4.509.797.725,86
Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan						
	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	10 Unit	10 Unit	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Sanitasi Layak	82 Persen	82 Persen	1.310.000.000,00	6.541.000.000,00	6.041.000.000,00
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	82 persen	82 persen	1.310.000.000,00	6.541.000.000,00	6.541.000.000,00
Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat						
	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	130 Rumah Tangga	485 Rumah Tangga	1.310.000.000,00	6.541.000.000,00	6.041.000.000,00

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	14,18 Persen	14,18 Persen	13.575.000.000,00	21.624.999.939,35	23.572.645.028,58
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian pembangunan drainase dalam jalan kabupaten di Daerah Kabupaten/Kota	14,18 persen	14,18 persen	13.575.000.000,00	21.624.999.939,35	21.624.999.939,35
Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan						
	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	12027 M	20743,46 M	13.350.000.000,00	21.399.999.939,35	23.348.386.301,78
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan						
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	5 Dokumen	5 Dokumen	225.000.000,00	225.000.000,00	224.258.726,80
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung yang Terekomendasi	0,372 Persen	0,372 Persen	50.607.000.000,00	67.714.737.800,00	99.975.399.024,96
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	-	-	50.607.000.000,00	67.714.737.800,00	67.714.737.800,00
Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						

	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	31 Dokumen	60 Dokumen	50.607.000.000,00	67.714.737.800,00	99.975.399.024,96
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	85 Persen	85 Persen	138.413.922.429,00	194.004.570.089,78	217.159.230.702,90
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase capaian penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	138.413.922.429,00	194.004.570.089,78	194.004.570.089,78
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan						
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	16 Dokumen	21 Dokumen	2.199.999.999,00	2.199.999.999,00	2.699.999.998,80
Penggantian Jembatan						
	Jumlah Jembatan yang Diganti	13 Jembatan	13 Jembatan	6.037.120.641,00	6.031.145.641,00	6.020.701.516,40
Pembangunan Jalan						
	Panjang Jalan yang Dibangun	18.503 KM	24,19 KM	37.074.220.917,00	43.155.416.622,07	47.444.209.310,35
Rekonstruksi Jalan						
	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	13.653 KM	36,454 KM	26.894.426.091,00	77.821.962.255,46	84.009.381.714,58
Pelebaran Jalan Menuju Standar						

	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	0.737 KM	1,419 KM	2.099.998.584,00	3.687.102.618,28	4.184.345.645,29
Pemeliharaan Rutin Jembatan						
	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	25 Jembatan	43 Jembatan	4.999.986.039,00	4.999.986.039,00	8.482.906.887,35
Rehabilitasi Jembatan						
	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	5 Jembatan	5 Jembatan	20.337.998.385,00	20.337.998.385,00	20.334.634.937,00
Pembangunan Jembatan						
	Jumlah Jembatan yang Dibangun	19 Jembatan	19 Jembatan	16.371.666.499,00	13.272.455.794,51	13.036.058.822,39
Rehabilitasi Jalan						
	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	9.370 KM	12,699 KM	18.398.505.392,00	18.498.502.853,46	26.297.005.395,32
Pemeliharaan Rutin Jalan						
	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	3.88 KM	4,747 KM	3.999.999.882,00	3.999.999.882,00	4.649.986.475,42
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Layanan Jasa Konstruksi	1,61 Persen	1,61 Persen	300.000.000,00	273.000.000,00	118.000.000,00
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase capaian Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	30 persen	30 persen	300.000.000,00	273.000.000,00	273.000.000,00
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota						
	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	10 Paket Pekerjaan	10 Paket Pekerjaan	300.000.000,00	273.000.000,00	118.000.000,00

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten dengan Pemanfaatan Ruang	100 Persen	100 Persen	1.724.853.996,00	3.787.099.081,91	2.902.990.013,14
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase capaian penetapan rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten Tanah Laut	100 Persen	100 Persen	1.299.795.280,00	3.031.104.751,88	3.031.104.751,88
Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang						
	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	164.998.178,00	261.301.559,64	221.301.559,64
Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota						
	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	6 Dokumen	8 Dokumen	1.057.798.743,00	2.059.557.279,36	1.779.157.279,36
Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang						
	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	1 Publikasi	1 Publikasi	29.999.300,00	90.468.564,78	0,00
Penetapan RDTR Kabupaten/Kota						
	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	6.999.762,00	354.911.629,22	185.911.629,22
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang						
	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	3 Laporan	1 Laporan	39.999.297,00	264.865.718,88	133.865.718,88

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	335.498.716,00	493.114.330,03	493.114.330,03
Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota						
	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	335.498.716,00	493.114.330,03	479.113.826,04
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana umum tata ruang kabupaten	100 Persen	100 Persen	89.560.000,00	262.880.000,00	262.880.000,00
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang						
	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	80 Dokumen	80 Dokumen	89.560.000,00	262.880.000,00	103.640.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.072.609.623,00	1.481.876.803,82	1.087.325.842,09
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				1.072.609.623,00	1.481.876.803,82	1.087.325.842,09
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Sengketa Tanah Kelompok Masyarakat, Organisasi, Lembaga dan Perusahaan di Lingkup Kabupaten Tanah Laut	100 Persen	100 Persen	1.022.609.834,00	1.403.857.353,82	1.034.090.419,09
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 persen	100 % 100 persen	1.022.609.834,00	1.403.857.353,82	1.403.857.353,82
Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						

	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Berita Acara	3 Berita Acara	609.999.724,00	757.499.354,74	474.030.804,91
Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						
	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	412.610.110,00	646.357.999,08	560.059.614,18
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Penatagunaan Tanah Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	49.999.789,00	78.019.450,00	53.235.423,00
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase hasil Konsolidasi Tanah Kabupaten Tanah Laut Persentase Penatagunaan Tanah Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen	49.999.789,00	78.019.450,00	78.019.450,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota						
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	49.999.789,00	78.019.450,00	53.235.423,00
UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi				298.972.761.213,00	420.505.431.108,38	481.841.423.202,98
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				297.900.151.590,00	419.023.554.304,56	480.754.097.360,89
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				297.900.151.590,00	419.023.554.304,56	480.754.097.360,89
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Sekretariat DPUPRP	81 Nilai	81 Nilai	14.727.197.114,00	15.243.214.855,88	15.392.424.091,55

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	155.561.298,00	155.561.298,00	155.561.298,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	4 Orang	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 Persen	840.211.018,00	765.835.633,08	765.835.633,08
Penyediaan Komponen Instalasi						
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.495.574,00	4.495.574,00	4.495.574,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	25.496.206,00	25.494.505,36	25.494.504,97
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.997.335,00	4.994.508,44	4.994.508,44
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.999.943,00	4.999.648,28	5.130.851,79
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						

	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	48.000.000,00	128.771.000,00	132.140.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	24.309.000,00	24.309.000,00	24.309.000,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	3.432.807.500,00	3.432.807.500,00	3.432.807.500,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 Persen	432.450.635,00	829.155.635,00	829.155.635,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	71.000.000,00	71.000.000,00	71.000.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar						

	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	7 Unit	11 Unit	135.135.135,00	435.135.135,00	435.135.135,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	23 Unit	7.980.000,00	109.881.000,00	21.666.000,00
				298.972.761.213,00	420.505.431.108,38	481.841.423.202,98

Tabel 3.2 Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja SKPD Tahun 2025 DPUPRP Beserta Alasan Yang Mendasari Perubahan

SKPD/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	Keterangan/ Alasan Perubahan
			APBD TA. 2025	Perubahan KUA dan PPAS		
1	2	3	4	5	6	7
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN BESERTA UPT			420,505,431,108.38	481,841,423,202.98	61,335,992,094.60	
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN			419,706,659,737.30	481,127,366,628.78	(61,420,706,891.48)	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			14,444,443,484.80	14,678,367,517.35	233,924,032.55	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			124,777,746.40	99,810,815.35	(24,966,931.05)	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	8 Dokumen	52,277,538.44	35,561,645.25	(16,715,893.19)	Mengikuti Inbup efisiensi
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	5 Laporan	72,500,207.96	64,249,170.10	(8,251,037.86)	Mengikuti Inbup efisiensi
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9,910,768,043.40	10,314,047,712.49	403,279,669.09	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	71 Orang/bulan	9,810,858,486.00	10,256,548,388.00	445,689,902.00	Karena ada penambahan PPPK sebanyak 6 orang yang semula anggarannya di BKPSDM, kemudian diminta SKPD untuk menganggarkan gaji dan tunjangan PPPK sebanyak 6 orang tersebut.
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	3 Dokumen	99,909,557.40	57,499,324.49	(42,410,232.91)	Mengikuti Inbup efisiensi
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			-	-	-	

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						
	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	0 Laporan	-	-	-	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			141,561,298.00	-	(141,561,298.00)	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						
	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	1 Paket	29,561,298.00	-	(29,561,298.00)	Mengikuti Inbup efesiensi
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	16 Orang	112,000,000.00	-	(112,000,000.00)	Mengikuti Inbup efesiensi
Administrasi Umum Perangkat Daerah			597,080,397.00	564,852,989.51	(32,227,407.49)	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	19,987,536.00	22,545,719.70	2,558,183.70	sesuai kebutuhan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	5 Paket	137,289,994.00	113,336,957.48	(23,953,036.52)	Mengikuti Inbup efesiensi
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	1 Paket	16,999,113.00	16,999,113.00	-	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket	34,914,051.00	33,833,926.65	(1,080,124.35)	sesuai kebutuhan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	1 Dokumen	3,000,000.00	3,000,000.00	-	
Penyediaan Bahan/Material						
	<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>	2 Paket	16,650,000.00	19,619,569.68	2,969,569.68	spanduk untuk dukungan porprov
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	366,250,000.00	353,528,000.00	(12,722,000.00)	Mengikuti Inbup efesiensi
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						

	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	1 Dokumen	1,989,703.00	1,989,703.00	-	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			24,309,000.00	24,309,000.00	-	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
	<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	0 Unit	-	-	-	
Pengadaan Mebel						
	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	6 Unit	24,309,000.00	24,309,000.00	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3,432,807,500.00	3,476,007,500.00	43,200,000.00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	410,000,000.00	410,000,000.00	-	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	0 Laporan	-	-	-	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	3,022,807,500.00	3,066,007,500.00	43,200,000.00	tambahan belanja pegawai (outsourcing)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			213,139,500.00	199,339,500.00	(13,800,000.00)	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	1 Unit	16,200,000.00	23,490,000.00	7,290,000.00	pemeliharaan mobil dinas jabatan (kadis)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	43 Unit	178,902,000.00	157,812,000.00	(21,090,000.00)	sesuai kebutuhan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	16 Unit	18,037,500.00	18,037,500.00	-	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			81,605,144,816.98	86,273,377,237.80	4,668,232,420.82	

Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			54,972,721,769.56	58,670,756,200.00	3,698,034,430.44	
Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota					-	
	<i>Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	99,999,900.00	99,999,900.00	-	
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota					-	
	<i>Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan</i>	28 Lembaga	499,996,163.00	499,996,163.00	-	
Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai					-	
	<i>Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara</i>	11 KM	3,899,959,465.89	4,099,998,079.14	200,038,613.25	Efisiensi sebesar 200jt dan penambahan anggaran rehab tanggul sebesar 400juta
Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya					-	
	<i>Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>	5 Unit	999,998,327.27	999,998,327.27	-	
Normalisasi/Restorasi Sungai					-	
	<i>Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi</i>	32.5 KM	7,499,422,625.54	8,147,419,454.87	647,996,829.33	Terdapat penambahan anggaran BTT untuk penanganan banjir
Pembangunan Breakwater					-	
	<i>Panjang Breakwater yang Dibangun</i>	0,15 KM	5,099,382,471.00	5,099,382,471.00	-	
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing					-	
	<i>Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun</i>	0,37 KM	11,799,661,793.46	11,799,661,793.46	-	
Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing					-	
	<i>Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi</i>	0,15 KM	499,989,568.00	499,989,568.00	-	
Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya					-	
	<i>Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi</i>	3 Unit	944,963,721.00	944,963,721.00	-	
Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya					-	
	<i>Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun</i>	0,4 KM	5,099,382,471.00	9,699,380,259.32	4,599,997,788.32	Penambahan anggaran untuk penanganan abrasi Muara

						Kintap
Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota					-	
	<i>Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun</i>	0 Dokumen	-	-	-	
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai					-	
	<i>Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun</i>	10 Dokumen	5,049,997,198.00	3,099,998,398.50	(1,949,998,799.50)	Mengikuti Inbup efisiensi
Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya					-	
	<i>Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun</i>	4 Unit	10,599,991,017.00	10,599,991,016.24	(0.76)	
Rehabilitasi Tanggul Sungai					-	
	<i>Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi</i>	8 KM	1,879,977,048.40	1,879,977,048.40	-	
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air					-	
	<i>Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun</i>	1 Dokumen	500,000,000.00	500,000,000.00	-	
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya					-	
	<i>Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun</i>	3 Dokumen	500,000,000.00	699,999,999.80	199,999,999.80	Penambahan anggaran untuk Perencanaan kegiatan TA 2026
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			26,632,423,047.42	27,602,621,037.80	970,197,990.38	
Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan						
	<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun</i>	0,07 KM	1,199,738,129.00	1,199,738,129.00	-	
Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa						
	<i>Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun</i>	0,049 KM	2,599,984,901.65	4,134,894,473.32	1,534,909,571.67	Penambahan anggaran untuk jembatan pertanian dan dermaga nelayan
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan						

	<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan</i>	0,2 KM	1,344,953,924.00	1,344,953,924.00	-	
Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa						
	<i>Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan</i>	5,350 KM	5,997,038,116.74	5,997,038,116.74	-	
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan						
	<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi</i>	0,6 KM	1,864,992,649.91	2,064,991,661.82	199,999,012	Penambahan anggaran untuk rehab jaringan irigasi
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa						
	<i>Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi</i>	10 KM	6,849,859,238.69	6,049,867,574.69	(799,991,664.00)	Mengikuti Inbup efisiensi
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan						
	<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>	0,5 KM	1,399,959,510.97	1,399,959,510.97	-	
Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi						
	<i>Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>	2 Bendung	299,969,142.00	599,963,463.34	299,994,321.34	Penambahan anggaran swakelola
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa						
	<i>Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>	6 KM	2,699,994,675.52	2,699,994,675.52	-	
Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi						
	<i>Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi</i>	4 Lembaga	375,933,759.24	311,220,509.00	(64,713,250.24)	Mengikuti Inbup efisiensi
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa						
	<i>Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun</i>	9 Dokumen	1,999,998,999.70	1,799,998,999.40	(200,000,000.30)	Mengikuti Inbup efisiensi
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			28,229,787,720.66	29,319,031,261.96	1,089,243,541.30	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			28,229,787,720.66	29,319,031,261.96	1,089,243,541.30	
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan						
	<i>Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun</i>	136 Unit	12,609,989,995.00	13,700,080,083.10	1,090,090,088.10	Pergeseran Dana dari SKPD Lain
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)						

	<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun</i>	8 Dokumen	609,999,999.80	609,153,453.00	(846,546.80)	
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					-	
	<i>Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun</i>	1 Liter/Detik	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	-	
Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					-	
	<i>Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan</i>	200 SR	4,509,797,725.86	4,509,797,725.86	-	
Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan					-	
	<i>Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi</i>	10 Unit	500,000,000.00	500,000,000.00	-	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			6,541,000,000.00	6,041,000,000.00	(500,000,000.00)	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			6,541,000,000.00	6,041,000,000.00	(500,000,000.00)	
Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat						
	<i>Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar</i>	485 Rumah Tangga	6,541,000,000.00	6,041,000,000.00	(500,000,000.00)	Tidak ada Penambahan/Pengurangan
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			21,624,999,939.35	23,572,645,028.58	1,947,645,089.23	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			21,624,999,939.35	23,572,645,028.58	1,947,645,089.23	
Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan						
	<i>Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun</i>	20743,46 M	21,399,999,939.35	23,348,386,301.78	1,948,386,362.43	Pergeseran Dana dari SKPD Lain
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan						
	<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun</i>	5 Dokumen	225,000,000.00	224,258,726.80	(741,273.20)	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			67,714,737,800.00	99,975,399,024.96	32,260,661,224.96	
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			67,714,737,800.00	99,975,399,024.96	32,260,661,224.96	
Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						

	<i>Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</i>	60 Dokumen	67,714,737,800.00	99,975,399,024.96	32,260,661,224.96	Pergeseran Dana dari SKPD Lain
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			194,004,570,089.78	217,159,230,702.90	23,154,660,613.12	
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			194,004,570,089.78	217,159,230,702.90	23,154,660,613.12	
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan						
	<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun</i>	21 Dokumen	2,199,999,999.00	2,699,999,998.80	499,999,999.80	Mengakomodir Perencanaan Pekerjaan Fisik untuk TA 2026
Penggantian Jembatan						
	<i>Jumlah Jembatan yang Diganti</i>	13 Jembatan	6,031,145,641.00	6,020,701,516.40	(10,444,124.60)	Mengikuti Inbup efisiensi
Pembangunan Jalan						
	<i>Panjang Jalan yang Dibangun</i>	24,19 KM	43,155,416,622.07	47,444,209,310.35	4,288,792,688.28	Pergeseran Anggaran dari DISPORA untuk mengakomodir kegiatan Porprov
Rekonstruksi Jalan						
	<i>Panjang Jalan yang Direkonstruksi</i>	36,454 KM	77,821,962,255.46	84,009,381,714.58	6,187,419,459.12	Penambahan Anggaran dari SILPA DAK dan DBH Sawit
Pelebaran Jalan Menuju Standar						
	<i>Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar</i>	1,419 KM	3,687,102,618.28	4,184,345,645.29	497,243,027.01	Merupakan pekerjaan prioritas yang harus segera dikerjakan
Pemeliharaan Rutin Jembatan						
	<i>Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin</i>	43 Jembatan	4,999,986,039.00	8,482,906,887.35	3,482,920,848.35	Pergeseran Anggaran dari DISPORA untuk mengakomodir kegiatan Porprov
Rehabilitasi Jembatan						
	<i>Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi</i>	5 Jembatan	20,337,998,385.00	20,334,634,937.00	(3,363,448.00)	Mengikuti Inbup efisiensi
Pembangunan Jembatan						

	<i>Jumlah Jembatan yang Dibangun</i>	19 Jembatan	13,272,455,794.51	13,036,058,822.39	(236,396,972.12)	Mengikuti Inbup efisiensi
Rehabilitasi Jalan						
	<i>Panjang Jalan yang Direhabilitasi</i>	12,699 KM	18,498,502,853.46	26,297,005,395.32	7,798,502,541.86	Pergeseran Anggaran dari DISPORA untuk mengakomodir kegiatan Porprov
Pemeliharaan Rutin Jalan						
	<i>Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin</i>	4,747 KM	3,999,999,882.00	4,649,986,475.42	649,986,593.42	Pergeseran Anggaran dari DISPORA untuk mengakomodir kegiatan Porprov
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			273,000,000.00	118,000,000.00	(155,000,000.00)	Tidak ada Penambahan/Pengurangan
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			273,000,000.00	118,000,000.00	(155,000,000.00)	
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota						
	<i>Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan</i>	10 Paket Pekerjaan	273,000,000.00	118,000,000.00	(155,000,000.00)	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			3,787,099,081.91	2,902,990,013.14	(884,109,068.77)	
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)			3,031,104,751.88	2,320,236,187.10	(710,868,564.78)	
Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang						
	<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	261,301,559.64	221,301,559.64	(40,000,000.00)	Mengikuti Inbup efisiensi
Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota						
	<i>Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota</i>	8 Dokumen	2,059,557,279.36	1,779,157,279.36	(280,400,000.00)	Mengikuti Inbup efisiensi
Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang						
	<i>Jumlah publikasi informasi penataan ruang</i>	1 Publikasi	90,468,564.78	-	(90,468,564.78)	Mengikuti Inbup efisiensi
Penetapan RDTR Kabupaten/Kota						
	<i>Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota</i>	3 Dokumen	354,911,629.22	185,911,629.22	(169,000,000.00)	Mengikuti Inbup efisiensi
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang						

	<i>Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.</i>	1 Laporan	264,865,718.88	133,865,718.88	(131,000,000.00)	Mengikuti Inbup efisiensi
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			493,114,330.03	479,113,826.04	(14,000,503.99)	
Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota						
	<i>Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota</i>	3 Dokumen	493,114,330.03	479,113,826.04	(14,000,503.99)	Mengikuti Inbup efisiensi
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			262,880,000.00	103,640,000.00	(159,240,000.00)	
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang						
	<i>Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang</i>	80 Dokumen	262,880,000.00	103,640,000.00	(159,240,000.00)	Mengikuti Inbup efisiensi
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			1,403,857,353.82	1,034,090,419.09	(369,766,934.73)	
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota			1,403,857,353.82	1,034,090,419.09	(369,766,934.73)	
Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						
	<i>Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	3 Berita Acara	757,499,354.74	474,030,804.91	(283,468,549.83)	Mengikuti Inbup efisiensi
Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						
	<i>Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	3 Dokumen	646,357,999.08	560,059,614.18	(86,298,384.90)	Mengikuti Inbup efisiensi
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			78,019,450.00	53,235,423.00	(24,784,027.00)	
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota			78,019,450.00	53,235,423.00	(24,784,027.00)	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota						
	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	78,019,450.00	53,235,423.00	(24,784,027.00)	Mengikuti Inbup efisiensi
UPTD PERALATAN DAN PENGUJIAN MATERIAL KONSTRUKSI			798,771,371.08	714,056,574.20	(84,714,796.88)	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			798,771,371.08	714,056,574.20	(84,714,796.88)	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			14,000,000.00	14,000,000.00	-	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	4 Orang	14,000,000.00	14,000,000.00	-	
Administrasi Umum Perangkat Daerah			168,755,236.08	172,255,439.20	3,500,203.12	

Penyediaan Komponen Instalasi						
	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	4,495,574.00	4,495,574.00	-	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	25,494,505.36	25,494,504.97	(0.39)	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	1 Paket	4,994,508.44	4,994,508.44	-	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket	4,999,648.28	5,130,851.79	131,203.51	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	128,771,000.00	132,140,000.00	3,369,000.00	Tidak sesuai usulan, mohon pertimbangan untuk perjalanan daerah kecamatan saja sdh minimal utk survey operasional alat, dan rapat koordinasi utk persiapan akreditasi, dan Blud, dan utk mendukung transportasi peserta bimtek jga tdk ada krn kebijakan efisiensi, makanya diharapkan pergeseran dari pemeliharaan utk rakor agar bisa diakomodir, sesuai arahan dr pj sekda, diperlukan tambahan kegiatan Rp.84.700.000,-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	-	-	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
	<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	1 Unit	-	-	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-	-	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	-	-	-	

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			616,016,135.00	527,801,135.00	(88,215,000.00)	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	6 Unit	71,000,000.00	71,000,000.00	-	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya						
	<i>Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya</i>	11 Unit	435,135,135.00	435,135,135.00	-	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	23 Unit	109,881,000.00	21,666,000.00	(88,215,000.00)	setelah dianalisa kembali, kondisi alat dapat diperbaiki manual, dan masih bisa dimanfaatkan utk program rapat koordinasi, Bimtek persiapan akreditasi lab, dan BLUD sesuai arahan pimpinan

Dalam tabel di atas untuk RENJA Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2025 terdapat 12 Program, 23 Kegiatan dan 86 Sub Kegiatan dengan Anggaran APBD Murni sebesar Rp. 420,505,431,108.38, setelah efisiensi/ Pergeseran sebesar Rp. 419,229,478,287.99, rencana pada Perubahan APBD menjadi Rp. 481.841.423.202.98 atau bertambah Rp. 61.335.992.094,6. dengan indikator kinerja kegiatan masing-masing.

Usulan Renja Perubahan Tahun 2025 meliputi :

a) Belanja

a) Pengurangan anggaran karena mengikuti Instruksi Bupati terkait Efisiensi, penyesuaian kebutuhan belanja dan bergeser ke Sub Kegiatan lain pada Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Sekretariat)
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Sekretariat)
3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Sekretariat)
4. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Sekretariat)
5. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Sekretariat)
6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Sekretariat)
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Sekretariat)
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Sekretariat)
9. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Sekretariat)
10. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai (Bid. SDA)
11. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa (Bid. SDA)
12. Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi (Bid. SDA)

13. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa (Bid. SDA)
14. Penggantian Jembatan (Bid. Bina Marga)
15. Rehabilitasi Jembatan (Bid. Bina Marga)
16. Pembangunan Jembatan (Bid. Bina Marga)
17. Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang (Bid. Tata Ruang)
18. Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota (Bid. Tata Ruang)
19. Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang (Bid. Tata Ruang)
20. Penetapan RDTR Kabupaten/Kota (Bid. Tata Ruang)
21. Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang (Bid. Tata Ruang)
22. Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota (Bid. Tata Ruang)
23. Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Bid. Tata Ruang)
24. Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Bid. Pertanahan)
25. Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Bid. Pertanahan)
26. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota (Bid. Pertanahan)
27. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT. PPMK)

b) Penambahan anggaran karena tambahan target capaian kinerja, Pergeseran Dana dari SKPD Lain, Perencanaan kegiatan TA 2026 dan peningkatan pelayanan publik pada Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Sekretariat)
2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Sekretariat)
3. Penyediaan Bahan/Material (Sekretariat)
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Sekretariat)
5. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Sekretariat)

6. Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai (Bid. SDA)
7. Normalisasi/Restorasi Sungai (Bid. SDA)
8. Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya (Bid. SDA)
9. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya (Bid. SDA)
10. Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa (Bid. SDA)
11. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (Bid. SDA)
12. Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi (Bid. SDA)
13. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan (Bid. CKJK)
14. Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan (Bid. CKJK)
15. Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Bid. CKJK)
16. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan (Bid. Bina Marga)
17. Pembangunan Jalan (Bid. Bina Marga)
18. Rekonstruksi Jalan (Bid. Bina Marga)
19. Pelebaran Jalan Menuju Standar (Bid. Bina Marga)
20. Pemeliharaan Rutin Jembatan (Bid. Bina Marga)
21. Rehabilitasi Jalan (Bid. Bina Marga)
22. Pemeliharaan Rutin Jalan (Bid. Bina Marga)
23. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT. PPMK)

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan (RENJA Perubahan SKPD) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 merupakan Tahun Pertama Rencana Kerja Pertama Tahunan Bupati dan Wakil Bupati Periode Tahun 2025 - 20230 atau peralihan dari Renstra Transisi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut 2024 – 2026 menjadi Renstra Transisi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut 2025- 2029 dalam rangka pencapaian target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui RKPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.

RENJA Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan adalah sebuah perencanaan pembangunan tahunan, sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025.

RENJA Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 dibuat dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi terkait dengan isu-isu penting berkaitan dengan tugas fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan menyangkut masalah Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan.

Dengan adanya RENJA Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya pejabaran dari Rencana Strategis Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut maupun dengan instansi Pemerintahan yang lain.

Pelaihari, 19 Juni 2025

Kepala Dinas



SYAKHRIL HADRIANANDI, ST

NIP. 19750412 199603 1 002